BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bantuan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Mensukseskan Program MBS di Jawa Barat

Pendidikan merupakan hal penting bagi perkembangan dan kesejahteraan suatu bangsa, yang sama pentingnya dengan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. UNICEF mendukung beragam upaya yang mendidik anak-anak dari umur pra sekolah hingga usia remaja. Bantuan yang diberikan merupakan komponen dari kampanye pendidikan yang dikelola UNICEF. Dari pelosok pedaerahan hingga perkotaan, UNICEF membantu pemerintah setempat dengan cara memobilisasi para guru, mendaftar anak-anak, mempersiapkan fasilitas sekolah dan mengorganisir kurikulum dan kadang membangun kembali sistem pendidikan secara keseluruhan.

Untuk program pendidikan dasar di Jawa Barat, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan dasar di Jawa Barat saat ini adalah menyangkut mutu pendidikan, termasuk kualifikasi guru, efektifitas metode pengajaran, manajemen sekolah dan keterlibatan masyarakat dalam memajukan pendidikan.

UNICEF berupaya mendukung dan membantu pememerintah daerah setempat yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan melakukan berbagai kerjasama dalam pelaksanaan program-program kegiatan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam program MBS ini

UNICEF memberikan bantuan terhadap pemerintah setempat melalui bantuan-bantuan teknis dan pendanaan.

4.1.1 Bantuan Teknis

Bantuan teknis ini dapat diberikan dalam bentuk *advokasi*, *pengembangan modul pelatihan*, *peningkatan kapasitas untuk tenaga kependidikan*, serta *penguatan kapasitas dalam monitoring dan evaluasi pendidikan*. Dalam bentuk advokasi, UNICEF membantu pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menganalisa data-data atau kondisi pendidikan di daerahnya dan mempresentasikan hasil analisa ini kepada para penentu kebijakan agar mereka dapat mengembangkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan yang benar-benar dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Dalam pengembangan modul pelatihan, UNICEF mendatangkan ahli dalam bidang kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah untuk membuat modul-modul pelatihan yang nantinya dapat digunakan untuk melatih para guru agar kapasitas mereka meningkat ketika menjalankan proses pembelajaran di kelas.

Dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, UNICEF melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para guru sesuai dengan modul pelatihan yang telah disusun / ditetapkan sebelumnya dalam pengembangan modul pelatihan guna meningkatkan output yang bermutu pada anak didik. Sedangkan dalam penguatan kapasitas dalam monitoring dan evaluasi pendidikan, UNICEF beserta dinas

pendidikan Jawa Barat membentuk tim untuk memonitor jalannya sistem pendidikan, mulai dari cara pengajaran serta hasilnya terhadap anak didik.

Kemudian tim tersebut mengevaluasinya dengan cara mengumpulkan data berdasarkan kenyataan dilapangan yang telah diperoleh mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik (Wawancara:Education Office-UNICEF,tanggal 05 Januari 2010).

4.1.2 Bantuan Dana

Untuk bantuan pendanaan, UNICEF mengucurkan dana pertahun dan setiap tahunnya dana tersebut jumlahnya berfariasi disesuaikan dengan kebutuhan provinsi dan tiap-tiap kabupaten / kota yang bersangkutan. Kisarannya antara US$ 20.000 sampai dengan US$ 70.000 per tahunnya yang diberikan ke tiap-tiap kabupaten / kota kerjasama UNICEF.

Mekanisme awalnya, UNICEF mengucurkan dana tersebut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat. Namun sejak tahun 2008, dana tersebut dikucurkan melalui kantor UNICEF perwakilan Jawa Barat yang berada di Kota Bandung, dan dari UNICEF perwakilan Jawa Barat tersebut diberikan langsung ke dinas-dinas kabupaten / kota kerjasama UNICEF (Wawancara:Rustiawati-Dinas Pendidikan JABAR,tanggal 09 Juni 2010).

Tabel 4.1

Kisaran Bantuan Dana Yang UNICEF Berikan Dalam Kurun Waktu 5 Tahun

No	Nama Kabupaten / Kota	Kisaran Pendanaan Per 5 tahun (th 2006 s/d th 2010)
1	Kota Cirebon	US$ 245.000
2	Kabupaten Subang	US$ 205.000
3	Kabupaten Sukabumi	US$ 180.000
4	Kabupaten Indramayu	US$ 145.000
5	Kabupaten Garut	US$ 210.000

Sumber: Educations Office UNICEF

Karena terbentur dengan sumber daya yang UNICEF miliki, selain dana tersebut diberikan pertahun maka dalam pemberian dana pertahunnyapun tidak diberikan secara langsung ke seluruh kecamatan-kecamatan dalam kabupaten / kota yang ditanganinya. Sebagai gambaran, misalnya pemberian bantuan dana pada tahun 2009 yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Jumlah Kecamatan Yang DIdanai UNICEF Pada Program MBS di Jawa Barat Tahun 2009

Jumlah Kecamatan	Nama Kabupaten / Kota				
	Kab. Garut	Kab. Sukabumi	Kab. Subang	Kab. Indramayu	Kota Cirebon
Total	5 Kec.	10 Kec.	4 Kec.	6 Kec.	6 Kec.
Didanai oleh UNICEF	3 Kec.	5 Kec.	3 Kec.	4 Kec.	6 Kec.

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi

Dari tabel tersbut bisa tergambarkan bahwa bantuan pendanaan yang UNCEF berikan terhadap beberapa kecamatan di 4 Kabupaten dan 1 Kota wilayah kerjasama tersebut, tidak semua kecamatan mendapatkan bantuan dana tersebut. Akan tetapi, setiap tahunnya tiap-tiap kecamatan di Kabupaten / Kota tersebut mendapatkan gilirannya atas dana tersebut.

4.2 Kendala Yang di Hadapi *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Penerapan Program Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat

Dalam menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah ini, pasti tidak akan semudah dengan apa yang diharapkan / dikehendaki dalam sasaran penerapan program ini, dan hal tersebut akan menjadi sebuah kendala bagi keberhasilan program tersebut.

Bagi UNICEF sendiri sebagai salah satu organisasi internasional yang dipercayai untuk membantu menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah di Provinsi Jawa Barat, berbagai kendala-kendala tersebut dipandang sebagai tantangan-tantangan yang merupakan dinamika pelaksanaan program yang menuntut inovasi dan strategi tersendiri untuk menghadapinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari program MBS tersebut. Dan tentunya hal tersebut dilakukan atas dasar kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Secara garis besar yang menjadi kendala dalam membantu menerapkan program MBS di Jawa Barat menurut UNICEF ada 5 (lima) kendala, yaitu diantaranya:

1. Pengaruh kebijakan pemerintah;
2. Kesiapan para Kepala Sekolah;
3. Kebiasaan para guru dalam penyampaian / cara pengajaran;
4. Kurangnya kecakapan para pengawas sekolah;
5. Pola pikir masyarakat (Wawancara: Educations Office-UNICEF,tanggal 05 Januari 2010).

4.2.1 Pengaruh Kebijakan Pemerintah

Salah satu tantangan yang paling menonjol dalam pelaksanaan program MBS di era desentralisasi ini adalah kebijakan pemerintah di Indonesia yang menyebabkan dengan terjadinya pergantian kepala daerah dan penentu kebijakan, khususnya di tingkat kabupaten. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dikarenakan di Indonesia sendiri apabila terjadi pergantian kepala pemerintahan, secara otomatis maka berganti juga kebijakan-kebijakannya, termasuk di Jawa Barat. Hal ini juga terjadi di saat terjadi pergantian kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

Kendala ini, sangat berdampak pada ketidaksinambungan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dasar yang sangat mempengaruhi kontinuitas program MBS ini.

4.2.2 Kesiapan Kepala Sekolah

Kendala yang kedua terletak pada kesiapan para kepala sekolah yang dalam program ini diharap menjadi seorang pemimpin yang mampu mengelola sekolahnya

dengan sumber-sumber yang dimilikinya. Karena dalam program MBS ini sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu komponennya adalah manajemen sekolah.

Dalam manajemen sekolah ini, sekolah mempunyai kemandirian (otonom) dengan membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikannya dengan sumber daya yang dimiliki sekolahnya, dan dalam proses ini kepala sekolah diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin yang dapat memimpin sekolahnya dalam berbagai hal diantaranya dalam membentuk komunitas sekolah yang melibatkan masyarakat sekitarnya.

Namun dalam hal ini ternyata para kepala sekolah ini masih kurang memiliki kemampuan dan tingkat kepercayaan diri dalam membangun jenjang komunitas disekitar sekolahnya untuk mewujudkan terciptanya komunitas sekolah ini.

4.2.3 Budaya Mengajar

Kendala yang ketiga adalah pada pelaksanaan MBS di tingkat sekolah, khususnya dalam proses belajar mengajar (para guru / pengajar). Sebagaimana diketahui, salah satu komponen MBS adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) yang penerapannya sangat ditentukan oleh guru.

Di banyak tempat, perubahan dari metode pembelajaran lama ke metode PAKEM memerlukan waktu yang cukup lama karena sulitnya merubah kebiasaan mengajar guru yang bersifat satu arah dan hanya terpaku pada penggunaan buku cetak. Meskipun para guru di sekolah sasaran telah dilatih tentang PAKEM, akan

tetapi sering kali mereka kembali pada pola mengajar yang sebelumnya. Kondisi seperti ini biasanya diatasi dengan pemberian bantuan teknis langsung ke sekolah agar guru bisa mempraktekkan langsung ilmu dan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam pelatihan dan secara bertahap menerapkan PAKEM dalam seluruh proses pembelajaran.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari perguruan tinggi tempat dimana para calon tenaga pengajar (calon guru) ketika menimba ilmu di akademi sebelum terjun kesekolah yang mengajarkan cara pengajaran yang relatif kurang mengarah ke komponen PAKEM.

4.2.4 Kurangnya Kecakapan Para Pengawas Sekolah

Kendala berikutnya adalah masalah dari pengawas sekolah. Dalam menjalankan program MBS ini, Dinas Pendidikan Provinsi dan UNICEF membentuk suatu tim yang berfungsi untuk mengawasi jalannya program MBS ini di sekolah-sekolah di kabupaten / kota kerjasama UNICEF.

Yang menjadi permasalahannya adalah, tim pengawas ini masih banyak yang berfikir sektoral baik di dalam tubuh dinas pendidikan itu sendiri maupun antar dinas, dan para pengawas ini masih sangat tergantung pada kapasitas perorangan bukan terhadap system sehingga bersifat pasif. Selain itu, pelaporan hasil kegiatan sering terlambat sehingga proses proposal juga terlambat.

4.2.5 Pola pikir masyarakat

Yang menjadi kendala terakhir adalah terletak di masyarakatnya sendiri / orang

tua siswa. Selain PAKEM, pengembangan program MBS juga dilakukan melalui komponen Peran Serta Masyarakat (PSM). Melalui komponen ini, masyarakat/orang tua siswa diharapkan dapat membantu pengembangan pendidikan melalui berbagai hal yang dapat mereka lakukan, seperti bekerjasama dengan guru dan kepala sekolah dalam merencanakan pengembangan sekolah, memantau pemanfaatan dana sekolah, menjadi tenaga sukarelawan dalam membantu memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, dan menjadi donator/penyumbang dana sekolah.

Akan tetapi, dengan maraknya kampanye pendidikan gratis, partisipasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan di sekolah menjadi kendur bahkan hampir tergerus. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya persepsi keliru di masyarakat mengenai konsep pendidikan gratis dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Banyak yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pendidikan hanyalah dalam bentuk dana dan pendidikan gratis telah mampu mengatasi semua kebutuhan proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Akibatnya, masyarakat dan orang tua siswa lepas tangan dari segala hal yang berkaitan dengan pendidikan anak mereka, mulai dari pembayaran SPP hingga pengembangan sekolah.

4.3 Upaya Yang Dilakukan UNICEF Untuk Membantu Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Program MBS di Jawa Barat

Seperti yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa dalam menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini pasti tidak akan

semudah dengan apa yang diharapkan dan hal tersebut akan menjadi sebuah kendala bagi keberhasilan program tersebut.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul tersebut, UNICEF bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi merumuskan berbagai inovasi / upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut yang diharapkan dapat meminimalisir bahkan sampai benar-benar menghilangkan kendala yang dihadapinya tersebut.

4.3.1 Pengaruh Kebijakan Pemerintah

Untuk memecakhan masalah ini, upaya yang dilakukan UNICEF sebagai organisasi yang independen berusaha meyakinkan bahwa siapapun pemegang pemerintahan di Jawa Barat, diharapkan agar tetap mendukung seluruh program-program pendidikan dasar berserta komponen-komonennya.

Selain itu, UNICEF bersama-sama dengan stakeholder pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten secara terus-menerus melakukan advokasi melalui berbagai media dan pertemuan untuk memperkaya wawasan pemimpin daerah maupun penentu kebijakan baru tentang pentingnya mendukung program peningkatan mutu pendidikan dasar seperti salah satunya program MBS ini.

Melalui advokasi ini diharapkan program MBS dapat secara terus-menerus memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi dalam proses penjalanannya sehinga dapat terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan di provinsi Jawa Barat.

4.3.2 Kesiapan para Kepala Sekolah

Upaya yang dilakukan untuk memberikan kesiapan / kepercayaan diri terhadap para Kepala Sekolah (Kepsek) adalah dengan cara memberikan pengarahan dan pelatihan-pelatihan terhadap para Kepala sekolah agar mereka mempunyai kesiapan dan kesigapan dalam memanajemen sekolah yang dipimpinnya, dan membuka wawasan mereka selaku pemimpin dalam sekolahnya untuk mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya oleh sekolahnya.

Selain itu, UNICEF berserta Dinas Pendidikan Provinsi, memberikan pelatihan yang melatih para kepala sekolah bagaimana cara untuk merangkul masyarakat sekitar agar peduli terhadap sekolah disekitar mereka agar terwujudnya komunitas sekolah.

4.3.3 Budaya Mengajar

Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah ini adalah dengan mengadakan pelatihan terhadap guru, dan melakukan pelatihan terhadap para pengawas sekolah dan melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengawas sekolah tersebut untuk mengontrol sejauh mana keberhasilan para guru dalm menerapkan pembelajran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM).

Selain itu, UNICEF mengusulkan kepada dinas pendidikan agar memberi penghargaan terhadap guru berprestasi untuk memotivasi para guru, dan kemudian dinas pendidikan mengaplikasikannya dengan pembentukan Seleksi Prestasi Guru dan Kreatifitas Siswa (SPGKS). Dan sejauh ini setelah hal tersebut diterapkan, para

guru termotivasi untuk menciptakan kreatifitas para siswanya melalui penerapan sistem pembelajaran PAKEM.

4.3.4 Kurangnya kecakapan para pengawas sekolah

Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah ini adalah, UNICEF beserta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pelatihan secara berkala terhadap para pengawas sekolah, karena para pengawas sekolah inilah yang kedepannya akan mengontrol / mengawasi sejauhmana sekolah-sekolah mengembangkan 3 (tiga) komponen dalam program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini.

Jadi, pada akhirnya apabila para kepala sekolah dan guru mengalami permasalahan dalam penerapan program ini, maka pengawas sekolah inilah yang kemudian akan mendampingi / mengarahkannya atas pelatihan-pelatihan yang telah didapatnya tersebut.

4.3.5 Pola pikir masyarakat

Untuk mengatasi hal ini, UNICEF dan mitranya di daerah kembali melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait mengenai konsep partisipasi masyarakat dan tentang berbagai bentuk partisipasi yang bisa diberikan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan di daerah mereka. Dengan begitu, masyarakat tidak menjadi merasa memiliki sekolah disekitarnya.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan meberikan pemahaman bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung

jawab bersama,sehingga masyarakat sekitar haruslah turut serta membantu dalam pembangunan pendidikan. Selain itu, UNICEF beserta Dinas Pendidikan terkait mengundang pihak sekolah dan tokoh masyatakat sekitar untuk diberikan pelatihan secara bersama. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengerti dan dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menunjang seluruh aspek pendidikan anak.

4.4 Keberhasilan Penerapan Program MBS di Jawa Barat

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini di Provinsi Jawa Barat terdiri dari 2 (dua) fase yang telah dilakukan mulai dari tahun 2001. Hasil dari fase pertama ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak yang kurang memahami dan masih mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan program ini di sekolahnya.

Didasari hal tersebut, kemudian pada fase berikutnya Dinas Pendidikan beserta UNICEF melakukan pensiasatan untuk memperbaikinya dengan mengevaluasi atas berbagai kekeurangan di fase pertama. Sehingga fase yang ke-2 ini merupakan penyempurnaan atas fase pertama.

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan beserta UNICEF ternyata ter-realisasi dengan hasil yang cukup memuaskan dari program MBS ini. Beberapa kemajuan mulai terlihat dan merata di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang ditangani oleh UNICEF. Kemajuan-kemajuan / keberhasilan-keberhasilan tersebut bisa dilihat dari kemajuan sekolah dan gugus yang merupakan keberhasilan dalam komponen Manajemen Sekolah dan PAKEM; komunitas sekolah yang merupakan

keberhasilan dalam komponen Peran Serta Masyarakat; serta keberhasilan lainnya bisa terlihat juga pada dinas-dinas terkait.

4.4.1 Keberhasilan Ditingkat Sekolah

Keberhasilan ini merupakan keberhasilan dalam penerapan komponen-komponen dalam MBS, seperti pada penerapan komponen manajemen sekolah dan komponen PAKEM. Keberhasilan-keberhasilan tersebut secara garis besar diantaranya sebagai berikut:

1. Para guru dan Kepala Sekolah senantiasa selalu menjalankan 3 (tiga) pilar (manajemen sekolah, PAKEM, dan peran serta masyarakat) disekolahnya walaupun dihadapkan pada beberapa kendala.
2. Sekolah-sekolah mulai mampu menjalin jaringan komunitas sekolah, dimana sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya sehingga terbentuklah komunitas sekolah.
3. Terciptanya rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerjasama dengan baik untuk membuat Rencana Pembangunan Sekolah, dan banyak sekolah-sekolah yang memajangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan sekolah sehingga mudah Di unduh / diketahui oleh masyarakat sebagai bukti akuntabilitas publik.

4. Otonomi sekolah mulai nampak, yaitu ditandai dengan hampir semua sekolah bisa membuat visi dan misinya sendiri.
5. Meningkatnya pengalokasian dan realisasi anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran disekolahnya.
6. Di tiap-tiap sekolah para guru mendorong para siswa mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman, dengan penekanan kepada pembelajaran *learning by doing* (belajar sambil bekerja).
7. Guru dan siswa mampu memanfaatkan media pembelajaran secara lebih kreatif.
8. Banyak para guru dan siswa yang mempunyai prestasi dan terkategori dalam Seleksi Prestasi Guru dan Kreatifitas Siswa (SGKS).

4.4.2 Keberhasilan Ditingkat Komunitas Sekolah

Keberhasilan ini merupakan keberhasilan dalam penerapan komponen MBS yang ke 3 (tiga), yaitu komponen peran serta masyarakat, yang menitikberatkan pada berbagai peranan yang masyarakat lakukan guna meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya. Keberhasilan-keberhasilan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dari para orang tua murid semakin meningkat dibandingkan sebelum diterapkannya program MBS.
2. Masyarakat sekitar mulai memahami dan menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
3. Mulai terciptanya Persatuan Otang tua Murid dan Guru (POMG).

4. Meningkatnya sumbangan dana masyarakat untuk membantu sekolah dan masyarakat secara sukarelawan menyumbang tenaga dalam merenovasi bangunan sekolah.
5. Terbentuknya komite sekolah dan paguyuban sekolah yang memiliki program kerja, diantaranya mampu menampung dana yang suatu waktu dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Misalnya: beasiswa anak didik, alat bantu belajar, sumber belajar, dan buku-buku perpustakaan.

4.4.3 Keberhasilan Ditingkat Dinas Terkait

Keberhasilan yang diperoleh pada dinas-dinas terkait ini diantaranya merupakan keberhasilan dari penerapan program MBS atas dinas pendidikan provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan dinas pendidikan kabupaten / kota. Keberhasilan-keberhasilan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mulai tahun 2008, dinas pendidikan memberikan beasiswa bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang tidak mampu untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
2. Adanya komitmen dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan pencanangan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disetiap kecamatan.
3. Mulai adanya alokasi dalam APBD untuk melangsungkan program MBS.

4. Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah menjadi bagian dari program kerja Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Tim pengawas yang dibentuk atas dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan Kabupaten / Kota berperan aktif dalam pengembangan dan implementasi program MBS.

4.5 Analisa Peranan UNICEF Dalam Penanganan Masalah Pendidikan Dasar di Jawa Barat

UNICEF sebagai salah organisasi internasional yang membantu negara Indonesia dalam menangani hak-hak untuk anak, memiliki peran serta dalam berbagai program / kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial bagi anak.

Pemerintah bekerjasama dengan UNICEF karena menganggap organisasi internasional seperti halnya dengan UNICEF ini berperan sebagai aktor independen. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah, karena dalam semua masukan atau kebijakannya yang dikeluarkan semata-mata untuk merealisasikan hak-hak dan mengatasi masalah-masalah sosial bagi anak-anak tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu.

Di Jawa Barat, UNICEF membantu pemerintah setempat yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan program Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS). Bantuan tersebut berupa bantuan teknis dan pendanaan kepada dinas-dinas terkait untuk berlangsungnya program ini.

Dari bantuan teknis dan pendanaan yang UNICEF berikan tersebut, sangatlah berarti untuk berlangsungnnya program ini di Jawa Barat. Dalam bantuan teknis ini, UNICEF memberikan berbagai masukan dan strategi yang sangat inovatif, yaitu seperti pemberian advokasi, pengembangan modul pelatihan, peningkatan kapasitas untuk tenaga kependidikan, serta penguatan kapasitas dalam monitoring dan evaluasi pendidikan. Selain itu, UNICEF sangat konsekuen pada sesuatu hal yang sedang dijalankannya, dan hal-hal tersebut sangat berguna / bermanfaat disaat adanya perubahan kebijakan politik, dimana UNICEF berupaya untuk meyakinkan para pemegang kekuasaan agar tidak merubah jalannya program-program pendidikan yang sudah dijalankan.

Manfaat lain dari peran serta UNICEF dalam program ini, yaitu bantuan dana yang UNICEF berikan. Walaupun dana yang diberikan tersebut diberikan pertahun dan tidak begitu besar, yaitu berkisar antara Rp 200.000.000 s/d Rp 600.000.000, namun dana tersebut sangatlah bermanfaat karena dapat menambah APBD untuk pendidikan, khususnya untuk menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah ini.

Selain bantuan-bantuan utama tersebut, UNICEF bersama-sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berupaya memecahkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan program ini melalui monitoring dan evaluasi yang

dilakukan secara bersama-sama. Sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.

Menurut peneliti, kerjasama ini sangatlah bermanfaat sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan dalam kerjasama ini UNICEF memiliki peranan tersendiri dalam membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu melalui bantuan-bantuan yang dilakukannya.

Selain itu, dari seluruh keberhasilan yang telah dicapai dalam penerapan program MBS ini, jelaslah bahwa semua hal tersebut didapatkan atas berbagai tahapan dari mulai diterapkannya MBS pada tahun 2001, hingga akhir periode di tahun 2010 sekarang ini dan atas berbagai usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, UNICEF, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, sekolah-sekolah, dan masyarakat sekitar.